

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A.P. Parlindungan, 2009, *“Pendaftaran Tanah Di Indonesia”*, Bandung: Mandar Maju.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Effendie Bactiar, 2006, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- Gunanegara, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli, dan Pembebasan tanah. Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

- Ismail Tjip. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta, Mira Buana Media.
- Mahfud Md, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Magister Kenotariatan. 2022. *Pedoman Penulisan Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2002*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mokhammad Najid, 2014. *Politik Hukum Pidana,. Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Zain, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Novina S Indiraharti, 2016, *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013,
- Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Setu Setyawan, 2009, *Perpajakan Indonesia Edisi 2009*, Malang: UMM Press.
- SF. Marbun. 2002. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Soehino, 2008, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soeprapto, 2007, *Ilmu PerundangUndangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*, Jakart: Salemba Empat,
- Wirawan B. nias dan Richard Burton., 2007, *Hukum Pajak, Edisi ketiga*, Jakarta: Salemba Enipat.
- Y. Sri Pudiarmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Jurnal dan Website

- DA. Mujiburohman, 2018, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (PTSL) ISSN 2442-695 "Researchgate", 4", *Bhumi*.
- Hidayat, A., Engkus, & Afra, 2018. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandung. Temah: *Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(1).
- Hikmahanto Juwana, 2005. Politik Hukum Undang-undang bidang Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum Vol.1, No.01*.

[Http://digilib.unila.ac.id/9032/12/](http://digilib.unila.ac.id/9032/12/) diakses pada 22 Maret 2024.

[Http://kbbi.web.id/perspektif.html](http://kbbi.web.id/perspektif.html) diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

[Https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/) diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/3710835/menteri-atr-sebanyak-118-kabupaten-kota-bebaskan-atau-ringankan-bphtb> di akses pada 20 April 2024.

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Silfy Maidianti, 2022, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research (JSER)*. Vol.4, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti.

Yusniaman Harefa, 2016, “Pengenaaan PPh Final dan BPHTB Terhadap Permohonan Hak baru Atas Tanah dan/atau bangunan yang Belum Bersertifikat yang Dialihkan setelah Bersertipikat di Kota *Binjai* “*Premise Law Jurnal*” Vol.3”.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

_____. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap. Berita Negara Nomor 501 Tahun 2018.

_____. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita Daerah Kabupaten Tebo Nomor 53 Tahun 2022.